

SKRIPSI

APRILIA RACHMAWATI

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1998**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1998**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.
NIP. 132 049 476

Penyusun,



Aprilia Rachmawati
NIM. 039814672

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

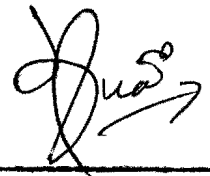
Pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2002

Panitia Penguji Skripsi :

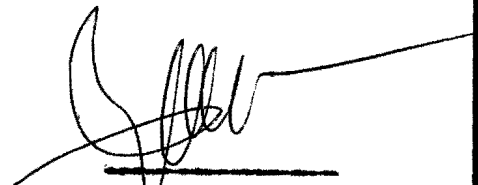
Ketua : Dr. H. Abdoel Rasiid, S.H., LL.M.



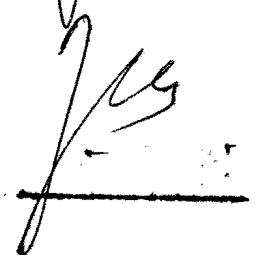
Anggota : 1. Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.



2. H. Basuki Reksa Wibowo, S.H., M.S.



3. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas mengenai aspek hukum penyelesaian sengketa kepailitan di pengadilan niaga menurut Undang-Undang nomer 4 Tahun 1998 dapat diambil kesimpulan :

1. Dengan adanya penambahan dan perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Kepailitan maka prosedur sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga jauh berbeda dengan jalur peradilan yang lambat, mahal dan kurang efektif seperti pada umumnya.
2. Proses penyelesaian sengketa kepailitan melalui Pengadilan Niaga merupakan sistem peradilan yang efektif dan efisien, hal ini dikarenakan adanya pengintegrasian sistem manajemen ke dalam sistem peradilan.

4.2. SARAN

Dengan melakukan perubahan dan penambahan ke dalam Undang-Undang Kepailitan diharapkan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan yaitu sistem peradilan yang cepat, murah, sederhana serta terbuka dengan motivasi hukum yang layak, akan tetapi hal ini tidak terlepas dari peran para pelaksana di dalam praktek sebab bagaimana bagusnya suatu peraturan jika peraturan itu tidak dilaksanakan dengan